

# Pengaruh Kompetensi Staf, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Muhammad Rizqi Dhiya Ulhaq, Sri Fadilah  
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
rizqiulhaq17@gmail.com, srifadilah03@gmail.com

**Abstract**—Regional government financial reports are a form of accountability in the context of the implementation of regional autonomy and regional government operations, this is a performance measure that must be accounted for at the end of each fiscal year. Some of the things that are the focus of attention are: Top Level Management Commitment, Human Resources Competency (accounting actors), and adequate accounting policies. Based on this phenomenon, the following problems can be identified: 1) How is the influence of Employee Competency on the Quality of Regional Government Financial Reports. 2) How does the influence of the application of government accounting standards on the quality of local government financial reports. 3) How is the Effect of Organizational Commitment on the Quality of Local Government Financial Reports. 4) Whether there is simultaneous influence of Employee Competency, Government Accounting Standards, and Organizational Commitment on the Quality of Regional Government Financial Reports. The research method used in this research is quantitative method. The population used in this study are employees or staff who work at the Regional Financial and Asset Management and the Regional Secretariat of Bandung City. With the sample selection technique, namely non probability sampling with purposive sampling technique. And data techniques by distributing questionnaires. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The results of this study are: 1) There is no financial effect among employees on the quality of local government reports. 2) there is an influence between government accounting standards on the quality of local government financial reports. 3) There is no influence between organizational commitment on the quality of local government financial reports. 4) Simultaneously contribute to employee competency, government accounting standards, and organizational commitment to the quality of local government financial reports.

**Keywords**—Employee Competency; Government Accounting Standards; Organizational Commitment, The Quality of Local Government Financial Reports.

**Abstrak**—Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional

pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu: Komitmen Top Level Management, Kompetensi Sumber Daya Manusia (aktor akuntansi), dan Kebijakan akuntansi yang memadai. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh Kompetensi Staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2) Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3) Bagaimana Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4) Apakah ada pengaruh Kompetensi Staf, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan atau staf yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Dengan teknik pemilihan sampel yaitu non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dan teknik pengumpulan data dengan menyebar kuisioner. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tidak terdapat pengaruh antara kompetensi staf terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) Terdapat pengaruh secara simultan antara kompetensi staf, standar akuntansi pemerintahan, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci**—Kompetensi Staf, Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Organisasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan keuangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Bastian, 2010).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya (Suwanda, 2013:58). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diperlukan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a) relevan; b) andal; c) dapat dibandingkan; d) dapat dipahami (Suwanda, 2013:96).

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, Fuad dan Ahmad, 2009:22).

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Suwanda, 2013:58). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Indra Bastian, 2010).

Komitmen organisasi adalah tingkat dimana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk menjadi anggota (Robbins & Judge (2014), Yusuf dan Syarif, 2018:31). Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan komitmen dari

pemimpin maupun anggotanya serta pada stakeholder sehingga laporan keuangan yang berkualitas dapat tercipta.

Dikutip dari penelitian Fadilah et al. (2019) mengenai deteksi kecurangan, keterampilan akuntansi dan audit diperlukan oleh para auditor, dan harus dianggap keterampilan dasar (Purpura dan Purpura, 2019), karena kecurangan terkait erat dengan siklus akuntansi dan proses audit. tetapi keterampilan tersebut juga diperlukan oleh staf keuangan pemerintah layaknya auditor karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas dari setiap informasi yang diterbitkan. Selain itu, untuk dapat mendeteksi penipuan, keterampilan penting lainnya juga diperlukan, salah satunya adalah keterampilan komunikasi (Smith, 2005), auditor menyelidiki dokumen sebagai bukti penipuan (Salleh dan Aziz, 2014), dengan keterampilan hukum atau keahlian yang diperlukan. untuk menganalisis risiko hukum dari suatu kasus (Huang et al., 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Staf, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan pengaruh Kompetensi Staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Dapat menjelaskan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Dapat menjelaskan pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Dapat menjelaskan pengaruh Kompetensi Staf, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## II. LANDASAN TEORI

Pengertian kompetensi menurut Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 (Fuad & Ahmad, 2009:22) menyatakan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Lebih spesifik, di dalam buku standar kompetensi nasional bidang teknologi informatika (Depdiknas RI, 2003:4) disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang mencakup penerapan keterampilan (*skills*) yang didukung dengan pengetahuan (*cognitive*) dan sikap (*attitude*) sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Menurut Wijaya (2008:4) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Komitmen organisasi adalah sejauh mana orang mengidentifikasi dirinya dengan organisasi yang mempekerjakan mereka. Ini menyiratkan kesediaan dari pihak karyawan untuk mengajukan upaya substansial atas nama organisasi dan atau niatnya untuk tinggal dengan organisasi untuk waktu yang lama (Wagner & Hollenbeck (2010), Yusuf dan Syarif, 2018:30).

Tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Suwanda, 2013:91) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dikutip dari jurnal Fadilah (2014), menyatakan bahwa kualitas informasi menurut Mc Leod dalam Azhar Susanto (2009:40) sebagai berikut: “Informasi dikatakan berkualitas apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap”.

Penerapan fair value dan basis akrual juga diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pengukuran fair value akan mempengaruhi keandalan dan relevansi informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan akuntansi berbasis akrual akan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan (Fadilah, 2016).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kompetensi Staf, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TABEL 1 KOEFISIEN DETERMINASI REGRESI BERGANDA

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,987 <sup>a</sup>	,974	,971	,103048

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas besarnya angka R square adalah 0,974 atau 97,4%. Artinya kompetensi staf, standar

akuntansi pemerintahan, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh sebesar 97,4% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, sisanya sebesar 2,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti standar akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan, peran audit internal, dan *good corporate governance*.

B. Pengaruh Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) menunjukkan pengaruh kompetensi staf terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan t-hitung sebesar 1,102 dengan nilai signifikansi sebesar 0,281 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Nilai t-hitung sebesar 1,102 yang lebih kecil dari nilai t-tabel 2,56 sehingga pada tingkat kekeliruan 5% hipotesis yang diajukan ditolak (Ho diterima dan Ha ditolak). Maka berarti kompetensi staf tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febrian Haty Ramdhan (2018), dimana dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi staf terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Surakarta. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra Muhammad Nazrin (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi staf berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kota Bikitnggi.

Dan berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap kompetensi staf pada BPKAD dan Sekda Kota Bandung yang memperoleh kategori “Cukup Baik”. Sehingga dapat diketahui bahwa kompetensi para staf yang bekerja pada BPKAD dan Sekda Kota Bandung memiliki kemampuan yang cukup baik. Pernyataan “Bagaimana tingkat pendidikan seorang staf dapat memengaruhi kompetensinya dalam melakukan pekerjaan”, yang nyatanya tingkat pendidikan yang dimiliki pada staf BPKAD dan Sekda Kota Bandung tidak selalu menjadi acuan untuk menilai kemampuan dalam persoalan laporan keuangan. Dan untuk pernyataan “Bagaimana sertifikasi yang dimiliki atau pun pelatihan yang diberikan untuk seorang staf dapat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas/pekerjaan”, pelatihan yang diberikan dirasa cukup efektif untuk menunjang kemampuan para staf BPKAD dan Sekda Kota Bandung terhadap pemahaman tentang laporan keuangan.

Kompetensi staf juga berdampak pada keandalan pengendalian internal, karena kompetensi yang dimiliki oleh para staf menunjang keandalannya dalam pengendalian internal. Sebagaimana yang dikatakan Fadillah (2020), pengendalian internal memperjelas bahwa pengendalian

internal tidak hanya memengaruhi laporan keuangan yang andal, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian harus efektif untuk semua operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian yang dilakukan oleh staf yang memiliki kompetensi yang baik akan memengaruhi kesesuaian dalam pembuatan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini nyatanya tidak sepenuhnya berbicara sesuai teori yang digunakan, karena pada Bab II telah dikemukakan bahwa ruang lingkup akuntansi keperilakuan yang meliputi cara-cara memproses informasi untuk membuat keputusan, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan informasi pada para penggunanya, dan pengembangan strategi dalam aktivitas organisasi, perlu ditunjang dengan kemampuan yang dimiliki para anggotanya agar komponen-komponen tersebut dapat dijalankan sesuai rencana.

#### C. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) menunjukkan pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan nilai t-hitung sebesar 25,084 yang lebih besar dari nilai t-tabel 2,56, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga pada tingkat kekeliruan 5% hipotesis yang diajukan ditolak ( $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak). Maka berarti standar akuntansi pemerintahan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrian Haty Ramadhan (2018), yang berpendapat bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Surakarta. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya Adhitama (2017) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Ogan Ilir.

Dari hasil penghitungan tanggapan responden terhadap standar akuntansi pemerintahan pada BPKAD Kota Bandung yang memperoleh skor 487 yang masuk kedalam kriteria "Cukup Baik". Sehingga dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang telah diterapkan dengan cukup baik BPKAD dan Sekda Kota Bandung. Pernyataan "Bagaimana pemenuhan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, meliputi basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip *full disclosure*, dan prinsip penyajian wajar", yang menggambarkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya efektif dijalankan. Dan untuk pernyataan "Bagaimana pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan telah

mengungkapkan seluruh informasi tentang kebijakan-kebijakan akuntansi, rincian dari masing-masing pos yang disajikan dalam laporan keuangan maupun yang belum disajikan dalam laporan keuangan", menunjukkan bahwa informasi tentang kebijakan akuntansi telah diungkapkan dan disajikan seluruhnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara rinci sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada Bab II, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan keterkaitannya dengan teori akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan diantaranya cara-cara memproses informasi untuk membuat keputusan dan pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya, telah berjalan selaras dengan hasil penelitiannya.

#### D. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) menunjukkan pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan nilai t-hitung sebesar -1,453 yang lebih besar dari nilai t-tabel 2,56, dengan nilai signifikansi sebesar 0,158 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga pada tingkat kekeliruan 5% hipotesis yang diajukan ditolak ( $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak). Maka berarti komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lola Septiana (2017), yang berpendapat bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawalunto. Sedangkan bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya Adhitama (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Ogan Ilir.

Dari hasil penghitungan tanggapan responden terhadap komitmen organisasi pada BPKAD Kota Bandung yang memperoleh skor 519 yang masuk kedalam kriteria "Baik". Sehingga dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang telah diterapkan dengan cukup baik BPKAD Kota Bandung. Skor terendahnya pada pernyataan nomor 4 sebesar 62 dengan pernyataan "Bagaimana pengaruh menghargai nilai hubungan dengan organisasi dapat berpengaruh baik terhadap komitmennya dalam bekerja", yang menggambarkan bahwa menilai hubungan dalam organisasi juga penting untuk menjaga komitmen organisasi, seperti hubungan antar staf menganggap rekan kerjanya hanya sebagai rekan satu profesi atau menganggap rekan kerja juga sebagai teman diluar kantor. Itu juga dapat berpengaruh dalam mengukur seberapa dalam keintiman antar anggotanya di sebuah organisasi. Dan untuk

pernyataan nomor 1 dengan skor 129 “Bagaimana lamanya masa kerja seorang staf berhubungan dengan komitmen dalam pekerjaannya”, menunjukkan bahwa durasi masa kerja dapat berpengaruh pada komitmen seorang staf terhadap organisasi atau pada pekerjaannya. Karena pada umumnya masa kerja yang cenderung lama, telah memiliki loyalitas terhadap organisasinya atau dalam pekerjaannya sehingga tingkat untuk keluar dari pekerjaan relatif rendah. Lamanya masa kerja juga dapat memengaruhi keandalan staf dalam menyajikan informasi sehingga sangat memahami informasi yang diperlukan pihak eksternal dan pihak internal organisasi, proses pembuatan keputusan, dan berbagai macam informasi dan laporan-laporan untuk berbagai macam situasi pembuatan keputusan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi staf, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD dan Sekda Kota Bandung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Kompetensi staf tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, itu berarti kompetensi aparatur daerah tidak menjadi jaminan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan selalu baik.
6. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya standar akuntansi pemerintahan telah menjadi pedoman utama dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar semakin baik.
7. Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya komitmen dalam berorganisasi tidak berperan langsung dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Kompetensi staf, standar akuntansi pemerintahan, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### V. SARAN

##### A. Saran Teoritis

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 30 responden yang didapat dari BPKAD Kota Bandung dan Sekda Kota Bandung. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti di BPKAD dan Sekda pada tingkat provinsi dengan responden yang lebih banyak dari penelitian ini.
2. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

seperti Sistem Pengendalian Internal dan .Pengelolaan Keuangan Daerah.

##### A. Saran Praktis

1. Prinsip-prinsip dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah harus diterapkan lebih baik lagi karena berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan.
2. Mempererat hubungan antar aparatur yang bekerja guna menghindari permasalahan pribadi yang dapat mengganggu aktifitas organisasi sekaligus menjaga loyalitas dalam bekerja sehingga terbentuk komitmen dalam organisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [2] Fadilah, S., Maemunah, M., Nurrahmawati, Lim, T.N., & Sundary, R.I.. 2019. *Forensic Accounting: Fraud Detection Skills For External Auditors. Polish Journal Management Studies*, Vol. 20, No. 1, 2019.
- [3] Fadilah, Sri, Rini Lestari, Mohd. Hadafi Sahdan, & Ahmad Zamil Abdul Khalid. 2020. *Internal Audit Effectiveness: A Case Of Indonesia. Talent Development & Excellence*, Vol. 12, No. 2s, 2020.
- [4] Fadilah, S., Nunung Nurhayati, Affandi Iss, Magnaz Lestira Oktaroza. 2014. Pengaruh Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat. *Prosiding SNaPP*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- [5] Ifrania, Naila, Sri Fadilah, Nurhayati. 2016. The Influence of The Application of Fair Value and Accrual Basis on The Quality of Local Government Financial Statements (A study on Government of Region IV West Java), *Prosiding Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- [6] Palan, R.. 2003. *Competency Management – A Practitioner’s Guide*. Kuala Lumpur: Suma.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM.
- [9] Syarif, Darman & Ria Mardiana Yusuf. 2018. *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi dan Mempengaruhi*. Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka.